



Bangli Terima Dana Desa Rp 19 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Kabupaten Bangli bakal menerima dana desa yang bersumber dari APBN 2015 sebesar Rp 11 miliar. Nantinya setiap desa akan diberi kesempatan mengelola anggaran tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Riana Putra, Rabu kemarin mengatakan, sebelumnya Kabupaten Bangli sudah memproses dana desa yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 8 miliar.

Namun, karena adanya perubahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, pemerintah pusat kembali mengucurkan dana Rp 11 miliar. Dengan kucuran dana itu, total dana yang diterima saat ini nilainya menjadi Rp 19 miliar lebih. Berdasarkan PP tersebut, pembagian dana desa ke masing-masing desa jumlahnya tidak sama besar. Alokasinya disesuaikan beberapa kriteria di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis (IKG).

Di Kabupaten Bangli, dana terendah yang diterima desa yakni Rp 280 juta, sedangkan tertinggi Rp 401 juta. Riana Putra mengatakan, sesuai panduan pemerintah pusat dana desa tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan pengembangan infrastruktur desa. Tidak untuk kegiatan operasional kantor atau yang lainnya. "Dana ini total untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Soal penjabarannya nanti disesuaikan dengan kewenangan desa," terangnya. Agar dana ini bisa terserap dengan baik, pemerintah juga akan menyiapkan pendamping di masing-masing desa. Desa akan didampingi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. (kmb40)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 10



Bangunan Vila, IMB Rumah Tinggal

Pemilik Diminta Ubah Izin

Singaraja (Bali Post) -

Penertiban vila yang dilakukan Badan Polisi Pamong Praja Buleleng, mulai dikritisi pengusaha penginapan itu. Alasannya, mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah setiap tahun. Sayangnya, kondisi di lapangan yang ditemukan Pol. PP yakni banyak bangunan yang diperuntukkan vila, namun IMB yang dimiliki jenis rumah tinggal. Karena itu, pemilik diwajibkan untuk mengubah izin tersebut.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Buleleng dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) dengan Badan Perizinan Terpadu dan tim investasi Pemkab Buleleng Rabu (8/4) kemarin. RDP dipimpin Ketua Komisi III Ni. Made Putri Nareni bersama anggotanya. Sementara eksekutif dihadiri oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Ida Bagus Puja Erawan, S.H., Kepala Badan Perizinan Terpadu Putu Karuna, dan Tim Investasi Pemkab Buleleng Ketut Suparto.

Anggota Komisi II I Wayan Edy Parsa yang juga dikenal dengan pebisnis vila mengatakan, sejak menggeluti usaha bisnis vila tahun 2007 dan ratusan vila yang telah dibangun itu mengantongi IMB kategori rumah tinggal. Sejak itu, dia membayar PBB kepada pemerintah daerah dengan nilai rata-rata Rp 200.000 per tahun. Belakangan pajak yang dilunasinya itu bertambah di mana nilai pajak rata-rata Rp 2 juta hingga Rp 6 juta per tahun. "Semua kewajiban itu saya sudah penuhi dan sudah memiliki IMB rumah tinggal. Nilai pajak yang kami setor untuk PAD itu mencapai Rp 6 juta per tahun," katanya.

Kendati sudah rutin melu-

nasi kewajiban kepada pemerintah, Pol. PP yang melakukan penertiban vila memaksa agar mengubah IMB rumah tinggal menjadi IMB vila. Sikap Pol. PP yang terkesan langsung main segel atau memperingati pemilik vila, dinilai terlalu berlebihan. Bahkan, ketika menyegel vila, Pol. PP tidak mengecek data terkait pembayaran kewajiban pengusaha kepada pemerintah daerah. Untuk itu, dirinya bukan tidak mau mengubah IMB rumah tinggal menjadi IMB vila, tetapi walau IMB-nya belum diubah, tetapi pajak tetap dilunasi. "Pengusahanya dipaksa agar mengubah IMB-nya. Padahal pajak untuk PAD rutin kita bayar. Harusnya ini menjadi pertimbangan tidak langsung main segel saja," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Investasi Pemkab Buleleng Ketut Suparto mengatakan, sesuai perkembangan di lapangan bahwa vila sebagian besar hanya memiliki IMB rumah tinggal. Namun faktanya vila tersebut disewakan kepada wisatawan asing. Dengan fakta itu, pemilik vila ini harus mengubah dari IMB rumah tinggal menjadi IMB vila. Perubahan ini sudah menjadi kewajiban pengusaha dan tidak bisa diabaikan begitu saja. "Untuk tertib administrasi dan kita harapkan diikuti, sehingga



Sambungan - - -



VILA - Komisi II DPRD Buleleng menggelar RDP Rabu (8/4) kemarin membahas terkait keberadaan vila tanpa izin.

usahanya menjadi legal dan ini tidak bisa dikaitkan dengan pembayaran pajak karena itu sudah menjadi kewajiban," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng, Ida Bagus Puja Erawan, S.H., mengatakan, dari segi fungsi lembaga yang ditugaskan memungut pajak, maka setiap vila baik itu IMB rumah tinggal atau sudah IMB vila, wajib dipungut pajak. Namun, pihaknya juga sepakat untuk memberikan penyadaran kepada pengusaha vila untuk tertib

administrasi perizinan yang sudah ada. "Kalau sudah ada transaksi, vila itu wajib membayar pajak ke daerah. Tapi kita minta perizinan ini diikuti oleh semua pebisnis vila," tegasnya.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng ini menambahkan, persoalan vila tanpa izin ini secepatnya harus diselesaikan. Hal ini dilakukan antara legislatif dan eksekutif untuk duduk bersama untuk menuntaskan masalah izin vila ini. Menyelesaikan vila tanpa izin

ini pun perlu dibahas secara intens dengan membentuk panitia khusus (pansus). Saat ini dari data yang ada menyebutkan kalau 74 vila tersebar di semua wilayah di Buleleng belum memiliki izin vila. "Persoalan izin vila sudah lama dan tidak ada penyelesaian. Tadi dari pertemuan kita sepakat bagaimana masalah ini dituntaskan dengan kita membahas bersama dan perlu dibentuk pansus, sehingga usaha vila ini menjadi legal," tegasnya. (kmb38)



Belum Terlatih Gunakan Uang Negara Bendesa Adat Rawan Terjerat Kasus Korupsi

Denpasar (Bali Post) -

Bantuan dana kepada desa adat oleh pemerintah daerah, mestinya diimbangi dengan pelatihan penggunaan uang negara tersebut supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka desa adat dalam hal ini bendesanya bisa dijerat kasus korupsi. "Apakah mereka (bendesa adat - red) sudah terlatih menggunakan uang negara itu? Jangan sampai karena kurang paham kena kasus korupsi," tegas Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny F. Sompie, Rabu (8/4) kemarin.

Pasalnya, lanjut Ronny, mereka bisa salah karena tidak paham administrasi pertanggungjawabannya. "Harus ada upaya pencegahan juga dengan cara

memberikan pelatihan dan pembinaan. Yang bertugas memberitahu, ya... pemerintah daerah. Kalau hal itu tidak dilakukan, ya... rawan kena korupsi," ujarnya.

Penegakan hukum merupakan upaya terakhir. Namun, paling penting adalah upaya pencegahannya. Kapolda berharap ada pembimbingan kepada bendesa adat terkait penggunaan bantuan dana tersebut.

Terkait penanganan kasus korupsi di Polda Bali, mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini akan mengecek kendala yang dihadapi, kenapa penanganan beberapa kasus belum tuntas. "Apakah SDM dalam hal ini penyidiknya kurang terlatih, harus dicek dulu. Menangani kasus korupsi itu tidak seperti kasus biasa, karena yang korupsi itu orang-orang

pintar," tegas Ronny.

Di samping itu, ia akan mengecek apakah ada kendala antara pengawas penyidik Polri dengan jaksa. Menurutnya, mungkin saja cara berpikirnya belum sama antara penyidik Polda dan jaksa. "Kalau belum sama pemahamannya, kita akan koordinasikan," ucapnya.

Pihaknya juga akan minta bantuan KPK yang memiliki kewenangan melakukan supervisi. Hal itu bisa dilakukan untuk memacu dan mencari solusi penanganan kasus. "Saya lebih tekankan upaya pencegahan. Untuk institusi pemerintah, sebenarnya bisa dilakukan itu (pencegahan - red), yang penting ada niat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencegah korupsi di Bali," ujarnya. (kmb36)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 3



Kasus Dermaga Gunaksa Besok, Tersangka Tim Sembilan Diadili

Semarapura (Bali Post) -

Para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah dari Panitia Pengadaan Tanah atau Tim Sembilan segera diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Setelah kasusnya dilimpahkan JPU ke pengadilan, pihak pengadilan telah menetapkan jadwal persidangan, Jumat (10/4) besok. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pejabat Pengelola Informasi Publik Kejari Klungkung Suhadi, Rabu (8/4) kemarin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan penetapan jadwal itu dari Pengadilan Tipikor Denpasar. "Sekarang kami sidang seminggu tiga kali. Dua kali untuk perkara Candra, satunya lagi untuk perkara Tim Sembilan," kata Suhadi. Para tersangka di Tim Sembilan berkasnya dibagi menjadi tiga. Pemecahan berkas perkara itu dilakukan untuk memudahkan pembuktian dalam persidangan nanti.

Perkara Tim Sembilan ini dikawal 12 JPU. Mereka antara lain Asman Tanjung, Subekhan, Tende, Suhadi, Made Pasek, Ade Nandar Silitonga, A.A. Gde Putra, Dicky Andi Firman-syah. Suhadi menegaskan, sudah siap menghadapi persidangan ini, meski

harus menjalani persidangan tiga kali dalam seminggu. "Kami ingin kasus ini segera tuntas," tegasnya.

Para tersangka Tim Sembilan diduga telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tim Sembilan atau Panitia Pengadaan Tanah sesuai Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007, yakni Ketua Panitia Pengadaan Lahan Sekda Klungkung Ketut Janapria, Wakil Ketua I Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Made Ngurah (sudah pensiun), Wakil Ketua II Kepala Kantor Pertanahan A.A Istri Agung Mastini (sudah pensiun), Sekretaris I Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Gusti Ngurah Gede (sudah pensiun), Sekretaris II Kabag Pemerintahan Gusti Ngurah Wiratmaja (sudah pensiun).

Sebagai anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum A.A Ngurah Agung, Kepala Bappeda Made Sugiharta, Kepala Badan Pendapatan Nyoman Sukantra, dan Plt. Dinas Pertanian I Nyoman Rahayu. Dalam sidang perdana, seluruh tersangka akan dihadirkan di dalam ruang sidang. (kmb31)

DERMAGA -
Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Sembilan terkait pembangunan Dermaga Gunaksa, Klungkung digiring ke sel tahanan. Tim Sembilan terjerat kasus mark-up harga lahan. Tim Sembilan kini ditahan di Rutan Gianyar.



Bali Post/dok

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 16



Bali Post/eka

PUTUSAN - Terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono meninggalkan ruang sidang usai mendengarkan putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/4) kemarin. Oknum anggota DPRD Gianyar ini diputus dua tahun penjara atas kasus korupsi bansos pembangunan pura di Gianyar.

Korupsi Dana Bansos
Oknum Anggota DPRD Gianyar
Divonis
Melebihi Tuntutan Jaksa

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 3



Sambungan - -

Denpasar (Bali Post) -

Satu lagi rekor diukir hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Jika sebelumnya terdakwa korupsi tidak dilakukan penahanan fisik, kini majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili justru menghukum oknum anggota DPRD Gianyar, terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono, melebihi tuntutan jaksa. Ya, terdakwa yang sempat dirawat di RS Jiwa Bangli itu divonis hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim tipikor, Rabu (8/4) kemarin.

Selain hukuman fisik, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Hakim dalam amar putusannya menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Herdian Rahadi, bahwa terdakwa Pramono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. "Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer," putus hakim.

Hanya soal besarnya hukuman, hakim tidak sependapat dengan jaksa. Bahkan,

hakim menaikkan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntutnya satu tahun enam bulan. Dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Yang memberatkan, menurut hakim, terdakwa telah merugikan keuangan negara c.q. keuangan Pemkab Gianyar. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai anggota dewan, mestinya dia memberi contoh baik. Terakhir, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya. Adapun pertimbangan yang meringankan adalah, terdakwa tidak pernah dihukum, bersikap sopan selama di persidangan, ada iktikad baik dari paman

terdakwa, Ngakan Padma, untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, disebutkan kasus ini berawal pada Juni 2012. Kala itu, terdakwa memanggil saksi Nyoman Punduh dan Wayan Artawa selaku *pangempon dadia* Pulasari Keliki, termasuk memanggil saksi I Wayan Suardiana dari Dadia Cemeng, Keliki. Terdakwa Pramono menyampaikan bahwa Dadia Cemeng dan Dadia Pulasari bisa mendapatkan dana bansos dari APBD Gianyar tahun 2013 untuk pembangunan *panyengker*. Saksi Punduh, Artawa dan Suardiana diminta menandatangani proposal bantuan Rp 51.800.000, namun terdakwa menyatakan bahwa dana ini untuk semua *dadia*. Sedangkan Dadia Pulasari dan Cemeng masing-masing akan dapat Rp 5 juta. Namun, mereka menandatangani Rp 51.200.000 dalam proposal.

Berdasarkan hasil kajian Staf Pemkab Gianyar, mengumumkan bahwa pembangunan *dadia* semuanya dibantu Rp 50 juta yang telah disetujui oleh Bupati Gianyar. Pada 16 Juli 2013, saksi Punduh dan Artawa terkejut melihat bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki Rp 50 juta, padahal sebelumnya terdakwa menyampaikan dana bantuan hibah hanya Rp 5 juta.

Pada 13 November 2013, bantuan dana hibah untuk Dadia Cemeng telah ditransfer ke *dadia* tersebut dan dicairkan oleh Wayan Suardiana Rp 50 juta. Dana tersebut diserahkan ke terdakwa, namun terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut hanya Rp 5 juta. Sisanya Rp 45 juta dikuasai oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri. (kmb37)



Naik, Target Retribusi Uji Ranmor

Negara (Bali Post) -

Dibanding tahun sebelumnya, target retribusi dari pengujian kendaraan bermotor naik menjadi Rp 516 juta lebih. Target dinaikkan setelah pada tahun sebelumnya, pencapaian retribusi melebihi target hingga Rp 30 juta lebih. Namun di sisi lain, tempat pengujian ranmor yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) belum memenuhi standar.

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Hubkominfo I Made Kumara Putra, Rabu (8/4) kemarin mengatakan target retribusi dari pengujian kendaraan ini menurutnya naik sekitar Rp 30 juta. Dari sebelumnya Rp 485 juta menjadi Rp 515 juta lebih.

Pada tahun lalu, dari target Rp 485 juta, unit pengujian kendaraan mampu merealisasikan Rp 516 juta lebih. Dengan dinaikkannya target tersebut, pihaknya optimis bisa tercapai.

Apalagi hingga bulan Maret sudah terealisasi Rp 135 juta lebih. Namun, diakuinya pula pelayanan pengujian kendaraan terganggu lantaran kekurangan alat pengujian rem secara digital. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan menguji se-

cara manual. Salah satu yang menjadi perhatian pengujian rem adalah lampu rem harus hidup, serta tidak terjadi kebocoran saluran rem. Alat itu bisa digunakan untuk menguji daya cengkeram rem.

Petugas saat ini mengandalkan pengamatan dengan mata yakni saat kendaraan berjalan lalu mengerem mendadak. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Gusti Agung Oka Diputra mengatakan terkait kurangnya alat itu sejatinya pernah diusulkan untuk pengadaan alat tersebut lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014. Namun saat itu, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bahwa dana itu tidak bisa digunakan untuk alat uji kendaraan. Sehingga tidak terealisasi.

Dana itu menurutnya hanya boleh untuk pengadaan rambu-rambu jalan raya. Harga untuk alat pengujian rem secara digital itu sekitar Rp 600 juta berikut sarana lainnya. Dinas akan mengupayakan agar pengadaan alat itu dilakukan secara bertahap. Tetapi fokus awal adalah untuk memperbaiki gedung serta lintasan kendaraan. Sebab menurutnya hal tersebut juga sangat penting untuk pelayanan. (kmb26)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 14



Pascaterbakar 2012

Renovasi Pasar Kidul

Tak Jelas

Bangli (Bali Post) -

Pascaputusan damai antara mantan pemegang SHGB Pasar Kidul dengan Pemkab, kelanjutan perenovasian ruko pasar Kidul belum jelas. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan tahapan pembangunan ini akan mulai dilakukan. Sementara itu, mengingat pembangunannya akan dilakukan dengan sistem bangun guna serah (BGS), Pemkab kini tengah mencari mitra untuk membangun ruko sesuai sistem yang telah disepakati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ida Bagus Wediatmika saat dikonfirmasi Rabu (8/4) mengatakan, sesuai dengan hasil koordinasinya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku *leading sector* pembangunan pasar, disebutkan kelanjutan perenovasian bagian ruko pasar yang sempat terbakar 2012 lalu itu saat ini

sudah direncanakan. Disperindag kini tengah melakukan penyempurnaan DED (*detail engineering design*) sesuai dengan yang disepakati pemilik ruko.

Wediatmika mengatakan, desain tidak dibuat oleh Dinas PU melainkan oleh konsultan yang disewa Disperindag. Dalam pembangunan ini, Dinas PU hanya akan melakukan veri-

fikasi terhadap kelayakannya saja. "Kami hanya memeriksa saja, apakah desainnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan," terangnya.

Selanjutnya, setelah DED selesai dikerjakan oleh konsultan kemudian desain tersebut akan dipublikasikan melalui ULP untuk ditenderkan. Mengingat sistemnya GBS, maka proses

pembangunannya nanti sepenuhnya akan dilakukan oleh investor. Bukan oleh pemerintah. Sementara itu, Bupati Made Gianyar didampingi Sekda Ida Bagus Giri Putra saat ditemui belum lama ini mengatakan, terkait kelanjutan perenovasian Pasar Kidul, Pemkab masih membuka ruang untuk mencari mitra yang akan membangun ruko.

Dia menyebutkan, dalam sistem BGS ini ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya, mitra yang mendaftar untuk membangun ruko tidak boleh kurang dari lima. Mitra-mitra tersebut nanti-

nya akan mengikuti proses tender. Dirinya dalam hal itu tidak boleh melakukan monopoli karena sistemnya sudah diatur. "Setelah tahapan DED siap, akan disampaikan dulu kepada pemilik ruko dan dikomunikasikan dengan warga masyarakat yang ada di sekitar pasar. Seperti inilah desain yang akan dibangun. Setelah itu selesai baru akan dilakukan pembangunan," paparnya.

Dirinya berharap rencana perenovasian ruko Pasar Kidul ini bisa dilakukan tahun ini. Karena memakai sistem BGS, maka pembangunannya tidak menganut tahun anggaran. (kmb40)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 10



Bali Post/kmb

TERSANGKA - Tersangka II kasus BBM bersubsidi Made Sueca Antara ketika proses tahap II atau pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Negara.

Serahkan Dana Titipan Rp 261 Juta Sueca Antara Pulang ke Rumah

Negara (Bali Post) -

Kasus BBM bersubsidi dengan tersangka II Made Sueca Antara yang juga anggota DPRD Jembrana dari PDI-P, Rabu (8/4) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Penyidik tipikor Polres Jembrana yang dipimpin Kanit III Reskrim Ipda Putu Merta dalam tahap II kemarin menyerahkan tersangka Sueca Antara dan barang bukti dan diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Negara Putu Sauca Arimbawa Tusan.

Penyidik yang berjumlah enam orang datang bersama tersangka Sueca Antara yang didampingi dua penasihat hukumnya Ida Bagus Panca Sidarta dan Made Merta Dwipa serta istri tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan barang bukti, pihak kejaksaan kemudian menunggu titipan uang pengganti dari pihak tersangka.

Menurut Sauca Arimbawa, dana titipan pengganti tersebut diusahakan oleh adik tersangka. Kemudian siang hari, tersangka menyerahkan dana titipan uang pengganti Rp 261 juta. "Nanti dana tersebut kami titip di bank," jelas Sauca.

Setelah proses tahap II sukses, dan dana titipan uang pengganti diberikan, tersangka Sueca keluar

dari Kejaksaan dan pulang ke rumah karena menjadi tahanan kota.

Menurut Sauca, setelah tahap II tersebut pihaknya menyiapkan rencana dewan dan dua minggu kemudian akan dilimpahkan.

Sebelumnya kuasa hukumnya, Ida Bagus Panca Sidarta dan Made Merta Dwipa Negara sudah mengajukan permohonan pengalihan penahanan ke Kapolres AKBP Harry Hariyadi. Sueca ditahan pada Senin (6/4) sore. Namun kemudian ditetapkan sebagai tahanan kota oleh Kapolres sejak 7-21 April.

Sueca Antara dikeluarkan pada Selasa (7/4) pukul 08.00. Sebagai penjamin dalam surat permohonan tersebut adalah istri tersangka, Ni Ketut Priwati. Kapolres AKBP Harry Hariyadi mengatakan pihaknya menahan tersangka Sueca Antara menjelang tahap II karena sebelumnya pada panggilan pertama sempat mangkir dengan alasan sakit.

Kemudian pada panggilan kedua dilakukan penahanan agar proses tahap II lebih mudah. "Jika tidak ditahan takutnya nanti ada alasan seperti kunker atau datang ke Kongres PDI-P, sehingga tahap II tidak bisa berlangsung sukses," jelasnya kepada wartawan,

Rabu (8/4) pagi.

Sementara itu dari pengamatan Rabu sore, jajaran Kejari langsung mengadakan rapat setelah mendapat informasi mantan Kadis Perindagkop yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut sudah divonis bebas di pengadilan tipikor Denpasar.

Diberitakan sebelumnya dari hasil audit BPKP Provinsi Bali, negara mengalami kerugian sebesar Rp 261,248 juta lebih akibat pemberian izin penggunaan BBM solar bersubsidi pada UD Sumber Maju yang dimiliki Made Sueca Antara. Dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, UD Sumber Maju sudah membeli solar bersubsidi sebanyak 45.449,54 liter untuk melakukan produksi pengolahan sabut kelapa.

Made Ayu Ardini ditetapkan tersangka sebagai pihak pemberi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada UD Sumber Maju. Sementara Sueca Antara selaku penerima manfaat atas rekomendasi tersebut karena posisinya sebagai pemilik UD Sumber Maju. Karena menurut penyidik, UD Sumber Maju tidak berhak mendapat solar bersubsidi karena perusahaan itu masuk kategori usaha kecil dan menengah. (kmb)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 14



Sidak Proyek IGD RSUD Dinding "Basement" Berbeda dengan DED

Singaraja (Bali Post) -

Belum ada satu bulan proyek pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng dimulai, dewan mulai mengawasi proyek prestisius tersebut. Rabu (8/4) kemarin, Komisi II DPRD Buleleng meninjau ke lokasi proyek. Dewan menemukan adanya perubahan desain beton dinding *basement* (lantai dasar-red) dari perencanaan *detail engineering design* (DED) yang sudah disusun.

Kunjungan Komisi II dipimpin langsung oleh ketuanya Putu Mangku Budiasa bersama Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Purna Adi Wijaya, dan anggota Komisi II DPRD Buleleng. Di lokasi, rombongan dewan diterima oleh *Site Engineering* Ketut Suardana didampingi Site Manajer Proyek IGD RSUD I Nyoman Astika. Selain itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr. Made Widiartana didampingi oleh PPTK Proyek IGD RSUD.

Sebelum meninjau lokasi proyek, rombongan dewan melakukan pertemuan di ruang rapat. Pertemuan yang sekitar satu jam itu berlangsung alot. Dewan meminta agar kontraktor pelaksana mempresentasikan pelaksanaan proyek. Dalam pertemuan itu terungkap kalau terjadi perubahan desain dalam item pekerjaan pembangunan beton dinding pada *basement*.

Berdasarkan dokumen DED beton *dinding basement* di sebelah timur itu dibangun dengan batu kali. Ketika proyek dimulai, tembok yang sudah ada harus dibongkar kemudian dipasang dengan yang baru. Kalau desain ini tetap diikuti, maka bangunan yang sekarang dan lokasinya lebih tinggi akan roboh. Atas kondisi itu, pihak kontraktor pelaksana PT Tunas Jaya Sanur bersama pengawas lapangan, PPTK kemudian membahas kendala tersebut. Hasilnya disepakati kalau tembok *basement* diganti dengan memasang borfile yang dikombinasikan dengan pemasangan



Bali Post/mud

IGD - Komisi II DPRD Buleleng memantau proyek pembangunan IGD RSUD Buleleng Rabu (8/4) kemarin.

gan batako.

Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa yang didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Purna Adi Wijaya mengatakan, perubahan desain untuk tembok *basement* itu dapat diterima. Dokumen tentang perubahan desain termasuk kajian teknis pekerjaan tembok *basement* itu diharapkan segera disempurnakan dengan DED yang sudah ada. "DED beton *basement* dari batu kali dan tembok yang sudah ini dibongkar. Kalau dilakukan dikhawatirkan bangunan di atasnya rawan longsor. Pada prinsipnya kami menerima dan perubahan desain itu segera disesuaikan dengan DED yang ada," katanya.

Sementara itu, *Site Engineering* Proyek IGD RSUD Buleleng Ketut Suardana menjelaskan, perubahan desain tembok *basement* itu sudah berdasarkan kajian dan kesepakatan pihak yang terkait dalam proyek ini. Perubahan dari batu kali menjadi borfile tidak langsung dilakukan, namun pihaknya mencoba dengan cara lain dengan memasang tiang pancang. Namun,

pemasangan tiang pancang ini pun mengalami kendala. Beton tiang panjang sulit menembus tanah yang berbatu dan bahkan tiang pancang yang dipasang patah. Atas kondisi ini alternatif terakhir dengan borfile ini bisa mengatasi kendala itu, sehingga disepakati untuk mengubah desain tembok *basement* itu dari DED yang sudah ada. "Sudah semua ada kajiannya dan sudah disepakati mengubah dan itu semua ada dokumennya. Desain batu kali seperti DED anggaran diperlukan sekitar Rp 1 miliar dan dengan borfile ini biayanya lebih murah yakni Rp 800 juta, sehingga ada penghematan anggaran," tegasnya.

Terkait realisasi pekerjaan, lanjut Suardana, saat ini pihaknya telah mengerjakan volume pekerjaan sekitar 2,80 persen. Pekerjaan ini masih tahap pada konstruksi *basement* dan ditargetkan kelar paling lambat bulan ini. Sementara kendala di lapangan tidak dialami dan untuk mengejar target di lapangan, pihaknya mulai memberlakukan tambahan jam kerja (lembur) untuk pekerjaannya. (kmb38)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 12



Soal "Panyengker" Hotel di Canggu Pejabat Badung Saling Lempar Tanggung Jawab

Mangupura (Bali Post) -

Keluhan masyarakat terkait keberadaan *panyengker* (pembatas) hotel yang menutupi saluran air menuju laut di Pantai Canggu, Badung, menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Namun, pihak terkait di Pemkab Badung terkesan saling lempar tanggung jawab. Sementara warga setempat tetap meminta tembok *panyengker* hotel tersebut dibongkar.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung telah turun melihat kondisi riil di lapangan dan menyatakan izin hotel tersebut sudah lengkap. "Kami sudah mengecek langsung ke lapangan atas pembangunan pagar tembok dan hotel tersebut. Dari hasil penelusuran dan bukti normatif di lapangan, pihak investor sudah melengkapi dokumen perizinan. Izin prinsip sampai IMB lengkap," ujar Kepala Satpol PP Badung I Ketut Martha saat dihubungi, Rabu (8/4) kemarin.

Menanggapi protes warga, Martha mengatakan, masalah tersebut menyangkut urusan teknis, sehingga bukan lagi menjadi wewenang Satpol PP. "Jadi, kami tidak berani memberikan penjelasan soal itu, karena menyangkut teknis. Yang lebih berhak memberikan penjelasan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) selaku pemberi izin," kilahnya.

Peletakan batu pertama pembangunan Hotel Canggu Intercontinental belakangan diketahui dilakukan oleh Wakil Bupati Badung I Made Sudiana. Namun, Sudiana sendiri mengaku belum mengetahui perihal tembok pembatas lahan hotel yang dibangun di bibir pantai tersebut. "Kalau itu saya tidak tahu secara jelas. Detailnya saya tidak tahu, karena kan ada

SKPD teknis yang memahami hal itu," kelitnya.

Ditanya mengenai apakah saat peletakan batu pertama sudah ada pembangunan pagar tembok, Sudiana mengakui saat itu belum nampak adanya pembangunan pagar tembok dimaksud. Tetapi dari dokumen perencanaan, segala persyaratan sudah dipenuhi. Bahkan, pihak investor disebutkan tergolong tertib. Sebab, sebelum membangun, persyaratan perizinan sudah lengkap termasuk sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Kalau memang ada pelanggaran, bisa dilihat, sesuai tidak dokumen perencanaan dengan fisik. Jika tidak sesuai, akan ada pemanggilan dan lain sebagainya," tandasnya.

Sementara itu warga di sekitar lokasi tetap meminta tembok *panyengker* tersebut dibongkar. I Nengah Astika Jaya, salah seorang warga, mengatakan setelah melakukan rapat bersama, Selasa (7/4) malam, warga menuntut agar kondisi dikembalikan seperti semula. "Pagar harus dibongkar, saluran air yang tertutup harus dibuatkan dan jalan yang dulunya rata dan lurus yang dibuat menanjak dan agak serong, juga harus dikembalikan," katanya. Menurutnya, keputusan itu telah disepakati oleh warga Canggu, khususnya Banjar Tempekan Tanah Barak dengan membubuhkan tanda tangan dukungan menuntut agar itu dikembalikan seperti sedia kala.

Sementara pihak investor yang membangun Hotel Canggu Intercontinental, hingga kini belum memberikan pernyataan terkait protes warga terhadap tembok pembatas hotel tersebut. Awak media pun belum mendapatkan informasi, di mana pihak pengelola hotel itu berkantor. (kmb27)